

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Subyek dan obyek penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD dan kinerja dewan dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Data penelitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden dari anggota dewan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.

B. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara diserahkan langsung dan dititipkan kebagian umum dewan beserta surat permohonan pengisian kuesioner, yang nantinya oleh bagian umum akan didistribusikan kepada responden dan pengumpulan kuesioner dilakukan pada waktu yang telah disepakati. Dimana total kuesioner yang disebar sejumlah 125 kuesioner dengan responden anggota dewan Kabupaten Sleman sebanyak 40 kuesioner, Kabupaten Bantul sebanyak 45 kuesioner dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 40 kuesioner, dari jumlah tersebut kuesioner yang kembali di

C. Karakteristik Responden

Penelitian ini mengamati karakteristik responden yang meliputi jumlah kuesioner, usia responden, jenis kelamin responden, lama menjabat dan pendidikan terakhir responden. Hasil distribusi frekuensi disajikan dalam tabel berikut ini:

1. Jumlah Respon Rate

TABEL 4.1
Jumlah Respon Rate

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner	125
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	(36)
3	Jumlah pengembalian kuesioner	89
4	Kuesioner yang bisa diolah	89
5	Respon Rate (Tingkat Pengembalian)	71,2%

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa dari 125 kuesioner yang disebarkan kepada responden, kuesioner yang dikembalikan dan dapat diolah sebanyak 89 kuesioner dengan tingkat pengembalian sebesar 71,2%.

2. Usia

TABEL 4.2
Distribusi Frekuensi Usia

No	Usia	Frekuensi	Prosentase
1	26 – 35 tahun	13	14,6%
2	36 – 45 tahun	47	52,8%
3	46 – 55 tahun	22	24,7%
4	56 – 65 tahun	7	7,9%
	Total	89	100%

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 89 responden, kebanyakan responden berusia diantara 36–45 tahun sebanyak 47 orang dengan prosentase 52,8%. Yang berusia diantara 46–55 tahun sebanyak 22 orang dengan prosentase 24,7%. Usia responden antara 26–35 tahun sebanyak 13 orang dengan prosentase 14,6%. Dan usia antara 56–65 tahun sebanyak 7 orang dengan prosentase 7,9%.

3. Jenis Kelamin

TABEL 4.3
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Pria	77	86,5%
2	Wanita	12	13,5%
	Total	89	100%

Berdasarkan tabel diatas, responden terbanyak berasal dari jenis kelamin pria yakni sebanyak 77 orang (86,5%), sedangkan sisanya sebanyak 12 orang (13,5%) berasal dari jenis kelamin wanita.

4. Lama Menjabat

TABEL 4.4
Distribusi Frekuensi Lama Menjabat

No	Lama Menjabat	Frekuensi	Prosentase
1	1 - 5 tahun	64	71,9%
2	6 - 10 tahun	20	22,5%
3	11 - 15 tahun	5	5,6%
	Total	89	100%

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, sebagian besar responden menjabat 1 - 5 tahun yaitu sebanyak 64 orang dengan prosentase 71,9%. Sedangkan yang menjabat 6 - 10 tahun sebanyak 20 orang dengan prosentase 22,5% dan

sisanya menjabat selama 11 - 15 tahun sebanyak 5 orang dengan prosentase 5,6%.

5. Pendidikan Terakhir

TABEL 4.5
Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Prosentase
1	SMU	27	30,3%
2	D3	5	5,6%
3	S1	54	60,7%
4	S2	3	3,4%
	Total	89	100%

Berdasarkan tabel 4.5, responden terbanyak adalah yang berpendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 54 orang (60,7%), dan yang berpendidikan SMU sebanyak 27 orang (30,3%), selanjutnya untuk yang berpendidikan D3 sebanyak 5 orang (5,6%) dan sisanya berpendidikan terakhir S2 sebanyak 3 orang (3,4%).

D. Deskriptif Data

Sebelum masuk pada pengujian kevalidan dan pengujian selanjutnya, terlebih dahulu akan diuraikan hasil dari analisis deskriptif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah memudahkan peneliti untuk membaca dan memahami maksudnya, dengan mengetahui nilai mean, minimum, maksimum serta standar deviasi seperti pada tabel 4.6 dibawah:

TABEL 4.6
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Pengetahuan dewan tentang anggaran	89	3,00	5,00	4,1742	0,49915
Partisipasi masyarakat	89	1,86	4,86	3,7529	0,60827
Transparansi kebijakan publik	89	1,60	5,00	3,4989	0,70590
Pengawasan APBD	89	3,50	5,00	4,3045	0,36179
Kinerja dewan	89	1,67	5,00	3,9025	0,78185
Valid N (listwise)	89				

Berdasarkan tabel 4.6 dijelaskan bahwa jumlah responden atau N 89 dengan nilai minimum untuk pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 3,00, nilai maksimum sebesar 5,00 dengan standar deviasi 0,49915 dan mean 4,1742. Nilai minimum partisipasi masyarakat adalah sebesar 1,86 nilai maksimum sebesar 4,86 dengan standar deviasi sebesar 0,60827 dan mean 3,7529. Nilai minimum transparansi kebijakan publik adalah sebesar 1,60 nilai maksimum sebesar 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,70590 dan mean 3,4989. Nilai minimum pengawasan APBD adalah sebesar 3,50 nilai maksimum sebesar 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,36179 dan mean 4,3045. Nilai minimum kinerja dewan adalah sebesar 1,67 nilai maksimum sebesar 5,00 dengan standar deviasi sebesar 0,78185 dan mean 3,9025.

E. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas dengan metode *Pearson Correlations* disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R	Sig	Keterangan
Pengetahuan dewan tentang anggaran	PD.1	0,743	0,000	Valid
	PD.2	0,743	0,000	Valid
	PD.3	0,827	0,000	Valid
	PD.4	0,704	0,000	Valid
Partisipasi masyarakat	PM.1	0,794	0,000	Valid
	PM.2	0,664	0,000	Valid
	PM.3	0,698	0,000	Valid
	PM.4	0,596	0,000	Valid
	PM.5	0,684	0,000	Valid
	PM.6	0,700	0,000	Valid
	PM.7	0,730	0,000	Valid
Transparansi kebijakan publik	T.1	0,633	0,000	Valid
	T.2	0,817	0,000	Valid
	T.3	0,813	0,000	Valid
	T.4	0,875	0,000	Valid
	T.5	0,522	0,000	Valid
Pengawasan APBD	PA.1	0,525	0,000	Valid
	PA.2	0,402	0,000	Valid
	PA.3	0,649	0,000	Valid
	PA.4	0,600	0,000	Valid
	PA.5	0,492	0,000	Valid
	PA.6	0,445	0,000	Valid
	PA.7	0,383	0,000	Valid
	PA.8	0,459	0,000	Valid
	PA.9	0,519	0,000	Valid
	PA.10	0,669	0,000	Valid
Kinerja dewan	K.1	0,852	0,000	Valid
	K.2	0,912	0,000	Valid
	K.3	0,902	0,000	Valid

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa semua item memiliki koefisien korelasi Pearson positif dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Berarti seluruh butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbath Alpha*. Suatu instrumen dikatakan handal/reliabel jika memberikan nilai *Cronbath Alpha* $> 0,60$. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

TABEL 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan dewan tentang anggaran	0,747	Reliabel
Partisipasi masyarakat	0,817	Reliabel
Transparansi kebijakan publik	0,790	Reliabel
Pengawasan APBD	0,822	Reliabel
Kinerja dewan	0,867	Reliabel

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel $> 0,60$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengawasan APBD dan kinerja dewan adalah reliabel.

F. Uji Asumsi Klasik

a Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dideteksi dengan uji *Kolmogorov Smirnov* yang ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut:

TABEL 4.9
Hasil Uji Normalitas Data

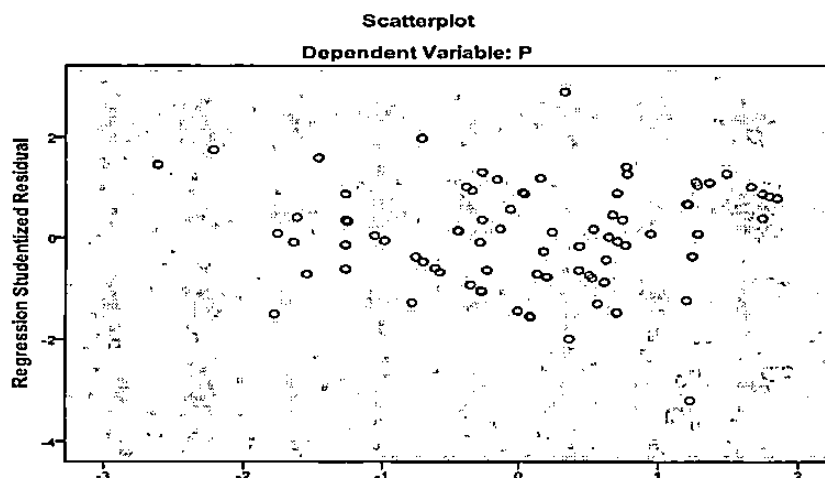
	Signifikansi	Keterangan
Model 1	0,968	Normal
Model 2	0,216	Normal

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan One-sample Kolmogorov Smirnov, nilai Asymp sig (2-tailed) yang diperoleh pada masing-masing model tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan kedua model data berdistribusi normal.

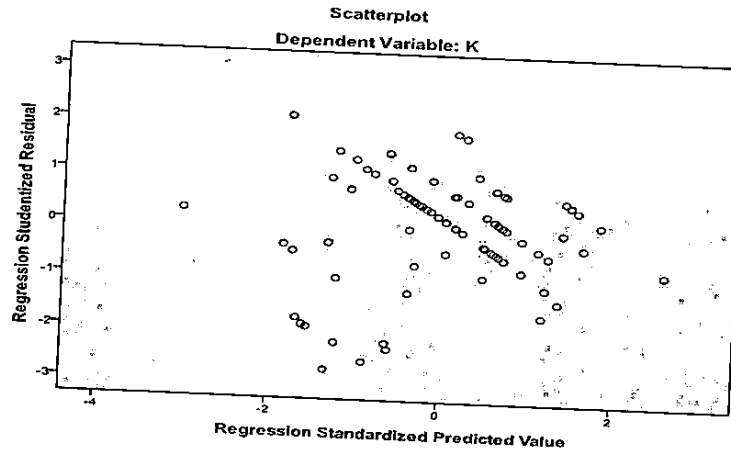
b Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

Model 1



Model 2



Dari gambar scatterplot model 1 dan model 2 diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada kedua model persamaan.

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolonieritas dalam penelitian ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu instrumen dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika diperoleh nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF masing-masing variabel bebas < 10. Hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut:

TABEL 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas Model 1

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
PD	0,020	51,130	Terjadi Multikolinieritas
PM	0,012	84,947	Terjadi Multikolinieritas
T	0,012	85,077	Terjadi Multikolinieritas
PD.PM	0,008	126,446	Terjadi Multikolinieritas
PD.T	0,008	130,028	Terjadi Multikolinieritas

TABEL 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas Model 2

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
PD	0,020	51,130	Terjadi Multikolinieritas
PM	0,012	84,947	Terjadi Multikolinieritas
T	0,012	85,077	Terjadi Multikolinieritas
PD.PM	0,008	126,446	Terjadi Multikolinieritas
PD.T	0,008	130,028	Terjadi Multikolinieritas

Berdasar tabel 4.6 tersebut dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* < 0,1 dan VIF masing-masing variabel bebas > 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengawasan APBD, dan kinerja dewan terjadi multikolinieritas

G. Hasil Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah MRA (*Moderated Regression Analysis*).

1. Analisis Berganda Model 1

a Regresi Berganda Model 1

Hasil uji regresi berganda model 1 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.12
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Model 1

Model	Unstandardized coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Contant)	1,100	1,424	0,772	0,442
PD	0,699	0,325	2,147	0,035
PM	0,164	0,344	0,477	0,634
T	0,035	0,297	0,118	0,907
PD.PM	-0,022	0,079	-0,284	0,777
PD.T	-0,007	0,071	-0,095	0,925
F	34,121			
Sig. F	0,000			
R Square	0,673			
Adjusted R Square	0,653			

Berdasarkan pengujian pada tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$\text{Pengawasan APBD} = 1,100 + 0,699\text{PD} + 0,164\text{PM} + 0,035\text{T} - 0,022$$

$$(\text{PD}*\text{PM}) - 0,007(\text{PD}*\text{T})$$

b Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama menguji tentang pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD. Nilai t sebesar positif 2,147 dan nilai koefisien regresi positif 0,699 dengan nilai sig (0,035) < α (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD, maka hipotesis pertama diterima.

c Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis kedua yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Nilai t sebesar negatif -0,284 dan nilai koefisien regresi sebesar negatif -0,022 dengan nilai sig (0,777) > α (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan sehingga partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating akan melemahkan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD, maka hipotesis kedua ditolak.

d. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga menguji pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Nilai t sebesar negatif -0,095 dan nilai koefisien regresi sebesar negatif -0,007 dengan nilai sig (0,925) > α (0,05) dapat disimpulkan terdapat

pengaruh negatif dan tidak signifikan sehingga transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating akan melemahkan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan APBD, maka hipotesis ketiga ditolak.

e. Uji Nilai F

Hasil uji F menunjukkan F hitung sebesar 34,121 bertanda positif dengan nilai sig (0,000) < α (0,05). Ini berarti bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD.

f. Uji Determinasi

Nilai adjusted R square sebesar 0,653 atau 65,3%, hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, dan variabel moderating yaitu partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik serta interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam menjelaskan variasi dependen yaitu pengawasan APBD, sedangkan sisanya 0,347 atau

2. Analisis Berganda Model 2

a. Regresi Berganda Model 2

Hasil uji regresi berganda model 2 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.13
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda Model 2

Model	Unstandardized coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Contant)	-4,276	3,720	-1,149	0,254
PD	1,850	0,850	2,176	0,032
PM	2,391	0,899	2,659	0,009
T	-1,578	0,775	-2,036	0,045
PD.PM	-0,537	0,206	-2,603	0,011
PD.T	0,370	0,184	2,004	0,048
F	18,118			
Sig. F	0,000			
R Square	0,522			
Adjusted R Square	0,493			

Berdasarkan pengujian pada tabel 4.13 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Dewan} = - 4,276 + 1,850\text{PD} + 2,391\text{PM} - 1,578\text{T} - 0,537$$

$$(\text{PD}*\text{PM}) + 0,370 (\text{PD}*\text{T})$$

b Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat dilakukan pengujian mengenai pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja dewan. Nilai t sebesar positif 2,176 dan nilai koefisien regresi positif 1,850 dengan nilai sig (0,032) < α (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap kinerja dewan, maka hipotesis empat ditolak.

c Pengujian Hipotesis 5

Pengujian hipotesis kelima yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja dewan dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Nilai t sebesar negatif -2,603 dan nilai koefisien regresi sebesar negatif -0,537 dengan nilai sig (0,011) < α (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif signifikan sehingga partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating akan melemahkan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap kinerja dewan, maka hipotesis kedua ditolak.

d Pengujian Hipotesis 6

Hipotesis terakhir menguji pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja dewan dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Nilai t sebesar positif 2,004 dan nilai koefisien regresi sebesar positif 0,370 dengan nilai sig (0,048) < α (0,05), dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan sehingga transparansi kebijakan publik sebagai variabel

moderating akan memperkuat pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap kinerja dewan, maka hipotesis ketiga diterima.

g. Uji Nilai F

Hasil uji F menunjukkan F hitung sebesar 18,118 bertanda positif dengan nilai $\text{sig } (0,000) < \alpha (0,05)$. Ini berarti bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja dewan.

h. Uji Determinasi

Nilai adjusted R square sebesar 0,493 atau 49,3%, hal ini menunjukkan kemampuan variabel independen yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran, dan variabel moderating yaitu partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik serta interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam menjelaskan variasi dependen yaitu kinerja dewan, sedangkan sisanya 0,507 atau 50,7% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model penelitian.

H. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan daerah nantinya. Karena dewan akan mampu menggunakan hak-haknya serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal teknis penyelenggaraan pemerintah dan kebijakan publik. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosseptalia (2006); Coryanata (2007); Werimon, dkk (2007); Pusedianto (2008); dan Darpito (2010) yang menunjukkan hubungan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD.

Hasil pengujian hipotesis kedua, menguji tentang interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat diketahui adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengawasan APBD. Hasil ini menunjukkan ketika dewan merespon informasi yang diterima berdasarkan obyek pemersepsi dalam hal adanya partisipasi masyarakat, namun informasi yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan dewan mengakibatkan dewan belum bisa sepenuhnya mengimplementasikan fungsi pengawasan.

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Werimon (2007) dan Darpito (2010), bahwa hubungan partisipasi masyarakat dan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Hasil pengujian hipotesis ketiga, menguji tentang interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik diketahui adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengawasan APBD. Hasil ini menunjukkan bahwa dewan merespon informasi yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal adanya transparansi kebijakan publik, informasi yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan daerah. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) dan Werimon (2007), bahwa hubungan partisipasi masyarakat dan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Hasil pengujian hipotesis keempat dapat diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dewan. Semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka kinerja dewan yang dilakukan akan semakin meningkat. Sebab dengan adanya kemampuan anggota dewan dalam deteksi kebocoran dan pemborosan anggaran diharapkan kinerja dewan akan meningkat, karena uang yang dikeluarkan akan setara dengan penyediaan pelayanan yang diberikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Werimon (2007) dan Darpito (2010), bahwa hubungan partisipasi masyarakat dan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

oleh Sardjito dan Muthaher (2007) yang ditemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial.

Hasil pengujian hipotesis kelima, menguji tentang interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat diketahui adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja dewan. Hasil ini menunjukkan ketika dewan merespon informasi yang diterima berdasarkan obyek pemersepsi dalam hal adanya partisipasi masyarakat, namun informasi yang diterima tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan. Anggota dewan masih belum bisa sepenuhnya menerima aspirasi dari masyarakat karena perbedaan persepsi antara dewan dengan masyarakat. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Milani dalam Sardjito dan Muthaher (2007) terhadap proses penyusunan anggaran, hasil penelitian tersebut ditemukan hubungan yang negatif antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

Hasil pengujian hipotesis keenam, menguji tentang interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik diketahui adanya pengaruh positif signifikan terhadap kinerja dewan. Hal ini menunjukkan bahwa dewan merespon informasi yang diterima berdasarkan objek pemersepsi dalam hal adanya transparansi kebijakan publik, informasi yang diterima ternyata berpengaruh terhadap kinerjanya. Dengan adanya transparansi, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program atau kegiatan dapat lebih terpantau

oleh dewan karena masyarakat juga ikut memantau dan mengontrol

tercipta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga kinerja dewan tercapai. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Brownell dalam Puspaningsih (2003) yang menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja manajer.